

BAB I

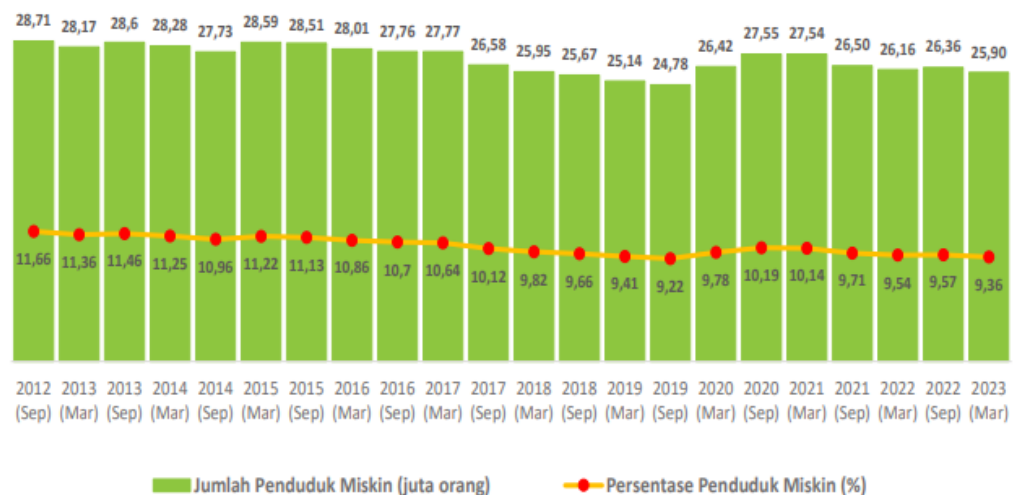
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan terus menjadi tantangan dan hambatan untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan sudah seharusnya menjadi perhatian seluruh negara didunia, karena sampai akhir abad ke-20, kemiskinan masih terus melanda seluruh negara. Permasalahan ini seharusnya dilihat sebagai sebuah masalah global, sehingga seluruh negara harus bekerja sama untuk menanganinya.¹

Menurut data dan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia masih terbilang tinggi. Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 dengan jumlah penduduk 278,8 juta jiwa. Pada Maret 2023, penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,90 juta orang.

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Indonesia, 2012-2023



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

Data di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Sejak periode 2012 sampai 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia terjadi penurunan, secara persentasenya ataupun kuantitasnya, kecuali pada beberapa periode yakni pada September 2013, kemudian Maret 2015, serta

¹ Murdiyana Murdiyana and Mulyana Mulyana, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10, no. 1 (2017): 73–96, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>.

periode September 2022 dikarenakan adanya kenaikan harga makanan pokok, dan harga bahan bakar. Adapun peningkatan persentase penduduk miskin di Maret 2020 dan September 2020 diakibatkan adanya pembatasan efek pandemi *Covid-19* di Indonesia. Lebih dari itu, isu kemiskinan ekstrem juga menjadi hal yang diperhatikan secara penuh oleh pemerintah. Berdasarkan data BPS, persentase kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 berada pada angka 2.14% kemudian pada September tahun 2022 angkanya menurun 0,4 poin menjadi 1,74% dan pada Maret 2023 angka miskin ekstrem Indonesia berada pada angka 1.12%.

Berdasarkan data diatas dalam kurun waktu 2012-2023 meskipun secara umum presentase kemiskinan terus mengalami penerunan akan tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan salah satu alat ukur untuk menilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan masyarakat yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan..

Akibat dari kegelisahan global terkait permasalahan kemiskinan yang terus menjadi momok bagi setiap negara, kesenjangan pendapatan, Ketidakadilan sosial dan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi memunculkan gagasan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)².

Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, menjadi bagian dari strategi pembangunan, yang tujuannya adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan selanjutnya. Tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) tersebut merupakan

² Ishartono and Santoso Tri Raharjo, "Sustainable development goals (SDGs)," *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium* 0042 (2023): 526–27, <https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104>.

komitmen dari seluruh negara anggota PBB dalam bekerja sama mengupayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan cara yang bijaksana³.

Sustainable Development Goals (SDGs) ialah program lanjutan untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati ditahun 2000. Program ini dinamakan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2015 untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di dunia⁴. Akan tetapi kenyataannya, MDGs belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di dunia. Masih banyak negara yang belum mencapai target, termasuk Indonesia. Pada periode Maret 2023, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) berada di angka 1,528 persen sedangkan tingkat indeks keparahan kemiskinan (P2) berada di angka 0,377 persen.

SDGs sendiri punya 17 tujuan yang diagendakan bisa direalisasikan diperiode 2015-2030. Tujuh belas tujuan tersebut yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan⁵.

Pemerintah tidak dapat mengandalkan dana APBN dan APBD saja untuk memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memberdayakan masyarakat. Membutuhkan kolaborasi yang solid antara

³ Gustani Gustani and Marina Yulinar, "Pencapaian Zakat Terhadap Sustainability Development Goals (SDGs) Di Tiga Desa Di Kabupaten Majalengka: Implementasi Indeks BI-WAS," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 64–77, <https://doi.org/10.37058/jes.v6i2.3391>.

⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Peta Jalan *Sustainable development goals* (SDGs) Di Indonesia," *Kementerian PPN/Bappenas*, 2017, 35.

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

pemerintah dan berbagai lembaga lainnya untuk mewujudkan SDGs di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk ikut andil dalam pencapaian SDGs melalui zakat.⁶

Potensi zakat Indonesia sendiri pada 2020 diangka Rp.327,6 triliun, berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ).⁷

Gambar 1.2 Potensi Zakat Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi zakat (triliun rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5*
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Puskas BAZNAS (2019b) dan (Puskas BAZNAS, 2020a)

Data ini menunjukkan sangat besarnya potensi zakat di Indonesia. Sebab itu itu, perlu dilakukan optimalisasi manajemen dana zakat, baik dalam proses penghimpunan maupun distribusinya, agar kontribusi zakat bisa dimaksimalkan dalam pengentasan kemiskinan dan terciptanya keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta dalam rangka membantu tercapainya SDGs melalui manajemen zakat yang berorientasi pada nilai-nilai SDGs.

Fungsi zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan tertuang dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011. Menurut Pasal 3b UU tersebut, pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan dan turunannya yang terkait dengan penggunaan dana zakat harus

⁶ Gabriele Lailatul Muharromah and Mustofa, "Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia," *Malia (Terakreditasi)* 13, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788>.

⁷ Pusat Kajian Strategis Baznas, "Renstra-BAZNAS-2020-2025," *Renstra-BAZNAS-2020-2025*, 2020.

ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Adanya mekanisme redistribusi pendapatan dari golongan kaya kepada golongan yang kurang mampu merupakan suatu langkah untuk mengintervensi pemenuhan kebutuhan primer para *mustahik* agar mereka terangkat dari garis kemiskinan.

Ada dua jenis organisasi pengumpul zakat berdasarkan UU NO. 23 tahun 2011, yakni BAZNAS sebagai lembaga pemerintah pengelola dana social islam di Indonesia, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), yakni lembaga swadaya masyarakat yang harus mendapatkan legalitas perizinan terlebih dahulu dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatannya. Adanya LAZ dari swadaya masyarakat ini dapat membantu BAZNAS dalam mengelola zakat di seluruh wilayah di Indonesia⁸.

Kota Kediri memiliki beberapa Organisasi Pengumpul Zakat Infaq dan *Shadaqah* yang sah legalitasnya diantara lain BAZNAS Kota Kediri, LAZISNU, LAZISMU, Lembaga Manajemen Infak (LMI) Ukhuwah Islamiyah, Nurul Hayat, Yatim Mandiri, Baitul Maal Hidayatullah, dan Rumah Zakat. Keberadaan Organisasi Pengumpul Zakat di Kota Kediri diharapkan dapat membantu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan masyarakat kota Kediri⁹.

BAZNAS Kota Kediri sebagai lembaga milik pemerintah memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan LAZ, selain dikarenakan jangkauan BAZNAS terhadap *mustahik* lebih luas daripada LAZ yang notabene hanya swadaya masyarakat, legalitas BAZNAS juga lebih kuat daripada LAZ dikarenakan LAZ sifatnya hanya membantu BAZNAS dalam mengelola zakat dengan lingkup yang lebih kecil. BAZNAS

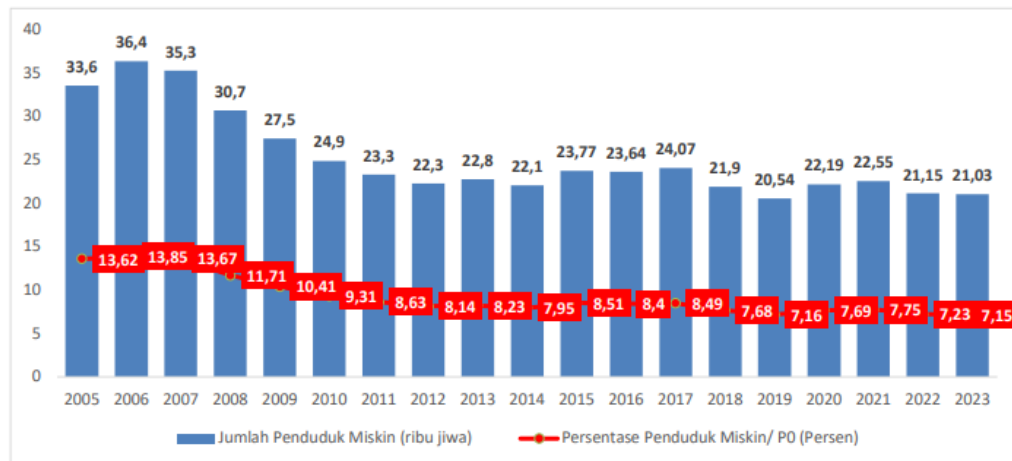
⁸ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Kaji Dampak Penyaluran Zakat Baznas Terhadap Kesejahteraan Mustahik Tahun 2016* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016).

⁹ Hanafi Haq Aninda and Zuraidah, "Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional Di Kota Kediri," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 6 (2021): 1–14, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/8817.

mengemban tanggung jawab atas zakat kepada Presiden berdasarkan UU No. 23 tahun 2011¹⁰.

Kemiskinan yang ada di Kota Kediri masih tergolong tinggi yakni sebesar 7,35 % dari total populasi penduduk yang ada di Kota Kediri.

Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin Kota Kediri.



Melihat data diatas, jumlah masyarakat miskin di Kota Kediri sebesar 21,03 ribu jiwa pada tahun 2023 dari total penduduk Kediri yang sebanyak 289.418 ribu jiwa dengan indeks kedalaman kemiskinan berada di angka 1.08 dan indeks keparahan kemiskinan yang sebesar 0.23.

Keadaan ini, mendorong pemerintah harus bersinergi dengan lembaga-lembaga social yang lain untuk terus berupaya agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Kediri. Kinerja BAZNAS Kota Kediri dalam membantu pemerintah memberantas kemiskinan tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Table 1.1 Data Keuangan BAZNAS Kota Kediri 2019-2023

Nomor	Tahun	Pengumpulan	Pendistribusian
1.	2019	922,704,882	922,205,968
2.	2020	875,518,561	871,080,070
3.	2021	854,652,075	849,151,933

¹⁰ Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 151, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>.

4.	2022	1,215,193,878	1,213,737,282
5.	2023	2,868,619,518	2,553,245,369

Sumber: Laporan BAZNAS Kota Kediri 2019-2023

Melihat data diatas, penerimaan dana yang telah dikumpulkan BAZNAS Kota Kediri mengalami trend positif, walaupun penerimaan dana ZIS pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena kondisi pandemic Covid-19, setelah itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yang mencapai Rp.1,215,193,878 dan sangat signifikan pada tahun 2023 mencapai Rp.2,868,619,518. Pencapaian ini juga mendorong peningkatan jumlah pendistribusian dana ZIS yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri.¹¹

BAZNAS Kota Kediri memiliki beberapa program guna menjalankan fungsi pendistribusian kepada *mustahik* diantaranya adalah:

Tabel 1.2 Daftar Program BAZNAS Kota Kediri

No.	Program	Jenis Bantuan
1.	Kediri Cerdas	1. Beasiswa SD-SMA 2. Pelatihan Wirausaha
2.	Kediri Peduli	1. Santunan dhuafa fakir dan miskin 2. Bantuan korban bencana alam 3. Bantuan Musafir & ibnu sabil 4. Bantuan bedah rumah
3.	Kediri Sehat	1. Bantuan biaya berobat 2. Bantuan biaya transportasi pengobatan diluar daerah
4.	Kediri Taqwa	1. Bantuan merbot masjid 2. Bantuan alat sholat untuk dhuafa
5.	Kediri Makmur	1. Bantuan usaha produktif 2. Bantuan modal dana bergulir

¹¹ BAZNAS Kota Kediri, "Laporan Keuangan BAZNAS Kota Kediri," Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, n.d.

Progam-progam tersebut diperuntukkan untuk orang yang masuk dalam kategori *ashnaf* 8. Peningkatan penerimaan pengumpulan dana ZIS yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Kediri, dalam beberapa tahun ini, juga ikut mendorong pertumbuhan jumlah *mustahik* setiap tahunnya.

Tabel 1.3 Jumlah *mustahik* BAZNAS Kota Kediri 2019-2023

NO	TAHUN	JUMLAH MUSTAHIK
1.	2019	2,531
2.	2020	2,431
3.	2021	2,854
4.	2022	4,783
5.	2023	7,292

Pertumbuhan jumlah *mustahik* dari BAZNAS Kota Kediri menunjukkan progam-progam pendistribusian yang telah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga memberikan manfaat kepada *mustahik*, khususnya yang berada pada kategori ekstrem dan di bawah garis kemiskinan, untuk dapat mengurangi beban kebutuhan dasarnya, sehingga dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah mewujudkan target *Sustainable development goals* ¹².

Realisasi seluruh progam pendistribusian yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai Rp.2.553.245.369 dengan jangkauan *mustahik* sebanyak 7.292 orang. Angka ini menunjukkan bahwa *mustahik* yang telah terbantu dengan adanya progam pendistribusian dari BAZNAS adalah sebesar 34,67% dari total penduduk miskin yang ada di Kota Kediri yakni sebesar 21.030 ribu jiwa pada tahun 2023. Intervensi progam pengentasan kemiskinan di Kota Kediri yang dilakukan oleh baznas dengan menggunakan Progam Kediri Peduli yakni progam santunan duaafa miskin sebanyak 3.725 orang atau sebesar 51 % dari total *mustahik* dan duaafa fakir sebanyak 95 orang atau 1,3 % dari total

¹² Lilla Alfira and Moch. Khoirul Anwar, "Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Unggulan BAZNAS Kota Kediri," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 7 (2022): 6981–92, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2086/1718>.

populasi mustahik, serta program Kediri makmur kepada 4 orang *mustahik* yang diberdayakan yang berkontribusi sebesar 0.05% dari total populasi mustahik. Program dana ZIS yang bersifat profuktif kepada 4 *mustahik* diatas membantu mereka dalam beranjak dari batas Garis Kemiskinan menuju Had Kifayah. Hal ini menunjukkan komitmen dari BAZNAS Kota Kediri untuk terus berupaya memberantas kemiskinan yang ada di Kota Kediri.

Selain itu, manajemen dana yang baik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri juga dibuktikan dengan kinerja penerimaan dana ZIS-nya yang tergolong baik dan mengalami trend peningkatan yang positif dan signifikan jika di bandingkan dengan beberapa BAZNAS di Karesidenan Kediri. Berikut merupakan data penghimpunan dana dari beberapa BAZNAS di Karesidenan Kediri pada tahun 2023:

Tabel 1.4 Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Karesidenan Kediri

NO	Nama Lembaga	Jumlah Dana Penghimpunan ZIS	Jumlah penduduk
1.	BAZNAS Kota Kediri	Rp. 2,868,619,518	289.418
2.	BAZNAS Kab. Madiun	Rp. 2,338,952,329	750 143
3.	BAZNAS Kab. Blitar	Rp. 2,514,509,973	1 231 013
4.	BAZNAS Kab. Kediri	Rp. 2,872,236,777	1 644 400

Data diatas menunjukkan BAZNAS Kota Kediri mengalami pertumbuhan yang baik dari segi penghimpunan dana walaupun jumlah penduduk Kota Kediri relatif kecil dari kabupaten yang lain kinerja daripada BAZNAS Kota Kediri lebih baik. BAZNAS Kota Kediri harus terus berkerja keras mengoptimalkan kinerjanya mengingat jumlah penduduk miskin yang ada di kota kediri masih tinggi sebesar 21,03 ribu jiwa pada tahun 2023 serta untuk terus meningkatkan kualitas

manajemennya agar dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Kediri dapat membantu masyarakat miskin dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan serta mewujudkan tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan manajemen dana ZIS yang efektif, efisien dan akuntabel yang selaras dengan SDGs .

Berdasarkan pertimbangan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis tentang “Manajemen Dana ZIS dalam mendorong pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Kota Kediri”

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimanakah manajemen dana ZIS dalam mendorong pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Kediri?
- b. Bagaimanakah implementasi manajemen dana ZIS di BAZNAS Kota Kediri untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan tentang manajemen dana ZIS di BAZNAS Kota Kediri dalam mendorong pengentasan kemiskinan.
- b. Untuk mendeskripsikan implementasi manajemen dana ZIS di BAZNAS Kota Kediri untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini harapannya dapat memperluas khazanah keilmuan mengenai manajemen dana ZIS dalam mendorong pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- b. Manfaat Praktis

1) Bagi Praktisi

Bagi praktisi, yakni BAZNAS Kota Kediri penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah masukan atau bahan koreksi dan informasi teoritis mengenai manajemen dana ZIS dalam mendorong pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang kemudian bisa dijadikan bahan rujukan dalam penetapan

kebijakan bagi BAZNAS Kota Kediri, sehingga BAZNAS Kota Kediri dapat menjadi lembaga yang lebih maju lagi kedepannya.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan referensi, pedoman dan acuan penelitian selanjutnya mengenai manajemen dana ZIS dalam mendorong pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

3) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan secara empiris kepada seluruh elemen masyarakat tentang manajemen zakat sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui dana ZIS.

E. Penelitian Terdahulu

- 1) Gabriele Lailatul Muharromah dan Mustofa, (2021) yang berjudul “Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia” dengan metode studi kepustakaan menyimpulkan, manajemen zakat dapat diselaraskan dengan tujuan-tujuan SDGs. SDGs juga telah diterapkan dalam organisasi pengelola zakat di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah memahami manajemen zakat yang sesuai dengan tujuan dari pada SDGs. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi penelitian yang digunakan yakni studi kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus¹³.
- 2) Chaidir Iswanaji dkk, (2021) yang berjudul “Implementasi Analytical Networking Process (ANP) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan”. dengan metode penelitian deskriptif ANP menyimpulkan distribusi zakat berpengaruh signifikan terhadap SDGs di kabupaten Jember, akan tetapi seluruh tujuan SDGs tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Ada empat strategi dalam

¹³ Gabriele Lailatul Muharromah and Mustofa, “Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia.”

mendorong SDGs dalam penelitian ini yakni: Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan sosial, manajemen risiko bencana yang efektif, meningkatkan penegakan hukum yang berkualitas, serta memperluas kesempatan kerja bagi UMKM. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang program yang dapat mendorong tercapainya SDGs sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian, penelitian ini dilakukan di kabupaten Jember sedangkan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kota Kediri karena berbeda objek penelitian dapat menyebabkan perbedaan kesimpulan yang dapat diambil¹⁴.

- 3) Puskas BAZNAS, (2017) dengan judul “Sebuah Kajian Zakat on SDGs; Peran Zakat dalam SDGs untuk Pencapaian Maqashid Syariah”. Metode penelitian ini menggunakan Matrix Matching Method dan ANP. Dengan kesimpulan terdapat relevansi antara zakat, SDGs dan Maqashid syari’ah. penelitian ini juga mengkategorikan SDGs sesuai dengan urutan prioritas. Zakat memiliki peran besar untuk peningkatan kualitas ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan serta dakwah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang zakat dapat memiliki peran dalam tercapainya SDGs. Sedangkan perbedaannya adalah dari metode yang digunakan, penelitian ini memakai metode matrix matching method dan Anp sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif¹⁵.
- 4) Miftahul Hasanah dan Istiqomah (2020) yang berjudul “Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs)” dengan hasil penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS semakin memudahkan umat Muslim

¹⁴ Chaidir Iswanaji et al., “Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 195–208, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681).

¹⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goal Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017, www.baznas.go.id.

membayar zakatnya dengan berbagai layanan yang dihadirkan baik melalui website atau aplikasi-aplikasi non tunai yang lain. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs dalam segi inovasi teknologi. Persamaan terhadap penelitian ini yakni membahas tentang keselarasan program SDGs dengan zakat akan tetapi perbedaannya adalah penelitian ini hanya difokuskan pada pengumpulan zakat sedangkan peneliti menyeluruh terkait manajemen zakat baik dari segi penghimpunan, maupun pendistribusiannya¹⁶

- 5) Nurma Khusna Khanifa, (2018) yang berjudul “Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo”. Dengan menggunakan penelitian studi kasus (*field research*) dan pendekatan kualitatif, kesimpulannya adalah terdapat keselarasan antara ZISWAF serta SDGs. Program ini secara umum berfokus pada enam tujuan: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, pertumbuhan perekonomian, mengurangi kesenjangan, serta lingkungan yang bersih. Persamaan dengan penelitian ini yakni menggunakan penelitian studi kasus (*field research*) dan pendekatan kualitatif. sementara perbedaannya adalah dari objek penelitian, yakni penelitian ini pada BMT di daerah wonosobo, sedangkan penelitian ini pada lembaga amil zakat milik pemerintah yakni BAZNAS Kota Kediri¹⁷.

¹⁶ Hasanah Miftahul and Istiqomah, “Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs),” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1, no. 1 (2020): 112–21, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/258>.

¹⁷ Nurma Khusna Khanifa, “Penguatan Peran Ziswaf Dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 149–68, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329>.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian peneliti menyusun sistematika penulisan agar dapat memudahkan penelitian.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini meliputi konteks penelitian, focus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori

Bab ini akan menguraikan tentang kajian teori yang sedang diteliti, yakni Manajemen, ZIS (Zakat, Infak, *Shadaqah*), Kemiskinan, dan SDGs yang akan menjadi pedoman pembahasan dalam menjawab permasalahan-permasalahan tentang manajemen dana ZIS dalam mendorong pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini didalamnya mengulas jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini mengungkapkan temuan penelitian yang meliputi uraian- uraian dan pemaparan data sesuai dengan konteks penelitian.

BAB V: Pembahasan

Bab ini berisi interpretasi dan penjelasan yang menghubungkan teori dan fakta yang diungkapkan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan.

BAB VI: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, kritik dan saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, diikuti dengan daftar pustaka, lampiran, pernyataan keaslian, serta daftar riwayat hidup.